

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdal. (2015). *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. Bandung : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Adityas Putra Rama Wibowo, dkk. (2018). *Kebijakan Publik Penerapan Teknologi Informasi Berbasis Aplikasi Android Untuk Mendukung Peningkatan Pelayanan di Dinas Penanggulangan Kebakaran & Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta*. Jakarta : Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen STIAMI

Amtai Alasan. (2021). *Formulasi Kebijakan Publik : Studi Relokasi Pasar*. Banyumas : CV. Pena Persada

Bambang Sunggono. (2013). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers

Imanuddin Hasbi, Hartoto, Dyah Maharani, dkk. (2021). *Kebijakan Publik*. Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung

Nuryanti Mustari. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : LeutikaPrio

Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenadamedia Group

Sahya Anggara. (2014). *Kebijakan Publik Pengantar*. Bandung : CV. Pustaka Setia

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. (2019). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada

Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta : Universitas Moestopo Beragama

JURNAL

Ahmad Fikri, Akhmad Hasanudin, Willy Kriswardhana. (2021). Analisis Kelayakan Finansial Perencanaan Ruang Parkir di Jalan Jawa Kabupaten Jember. *Borneo Engineering : Jurnal Teknik Sipil*. 5(1) : 1

Ali Marwan HSB, Evlyn Martha Julianthy. (2018). Pelaksanaan Kewenangan

Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 15(2) : 4

Dewi Bussaina Ghassani, Ermayana Megawati, Muhammad Bagus Setiawan. (2021). Analisis Kebutuhan dan Penataan Lahan Parkir di Pasar Pegandon, Kabupaten Kendal. *Reviews in Civil Engineering*. 5(1) : 22

Endro Nurbantoro, Syaiful Anwar, Joni Widjayanto, Helda Risman. (2021). Analisa Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019. *OSF Preprints*. 22 Agustus

Kania Damayanti. (2005). Proses Perumusan Kebijakan Publik dan Implikasinya Bagi Penyelenggaraan Kepemerintahan yang Baik di Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*. 2(1) : 51

Larasati Widoningtyas, Sukidin, Bambang Soepeno. (2016). Pola Interaksi Sosial Patron Klien Antar Pelaku Parkir di Alun-Alun Jember. *Jurnal Pendidikan dan Humaniora*. 52(1) : 60

Lukman Hakim. (2011). Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*. 4(1) : 116

Moh. Gandara. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. *Khazanah Hukum*. 2(3) : 94

Nova Puspita Anggraini. (2020). Analisis Perubahan Pola Perilaku dan Alih Fungsi Bangunan Komersial Menjadi Lahan Parkir di Stasiun Bekasi (Studi Kasus : Jalan Perjuangan Bekasi). *Jurnal Kalibrasi*. 3(1) : 49

Rahyunir Rauf. (2017). Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan. *Wedana: Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*. 3(1) : 224

Roy Ardiansyah, Sundarso, Tri Yuniningsih. (2016). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan. *Journal of Public Policy and Management Review*. 5(2) : 2

Taufik Irfadat, Niken Ardiansyah, Haeril. (2021). Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kantor Camat Raba Kota Bima. *JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*. 2(1) : 66

Winasis Yulianto. (2014). Rekonseptualisasi Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. *Jurnal Ilmiah Fenomena*. 12(1) : 1125

Yudha Ardiriskara, Ali Imron. (2015). Alih Fungsi Bahu Jalan di Kecamatan Krian. *Paradigma*. 3(1) : 2

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember

Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum